

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Industrialisasi

2.1.1 Defenisi Industri dan Industrialisasi

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 2004).

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Sukirno (2006) pengertian industri adalah:

“Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (assembling). Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai

leading sector maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2004).

Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

Sumbangan kegiatan industri pengolahan (*manufacturing*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970 sektor industri pengolahan menyumbang 8,4 persen terhadap PDB,

dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen, dan pada tahun 1997 meningkat lagi menjadi 25 persen (Arsyad, 2004).

2.1.2 Pengelompokan Industri

Industri dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu kelompok industri besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, dan industri kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang, dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1-4 orang (BPS DIY, 2000). Klasifikasi industri menurut tenaga kerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Klasifikasi Industri menurut Banyaknya Tenaga Kerja

No.	Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Industri Besar	100 ke atas
2	Industri Sedang	20 – 99
3	Industri Kecil	5 – 19
4	Industri Rumah Tangga	1 - 4

Sumber: BPS DIY, 2000

a. Industri Besar Sedang

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi Sembilan sub sektor.

Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar.

b. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga.

Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor.

Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

c. Industri Kecil Dan Menengah

Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika

dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manajemen juga lebih maju.

Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran.

Potensi industri kecil baik yang sudah terkumpul dalam sentra maupun yang menyebar sebanyak 17.865 unit usaha dan 73 sentra dengan tingkat penyerapan tenaga kerja lebih dari 78 ribu orang di Kabupaten Bantul pada tahun 2006.

2.1.3 Strategi Industrialisasi

a. Strategi Substitusi Impor (SI)

Dalam melaksanakan industrialisasi, ada dua pilihan strategi, yaitu strategi substitusi impor (SI) atau strategi promosi ekspor (PE). Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang menggantikan impor, sedangkan strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Jadi berbeda dengan strategi SI, dalam strategi PE tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya dari

pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi kepada pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor.

Strategi SI dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Strategi PE dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor.

Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini terutama adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya alam (seperti bahan baku) dan faktor produksi (terutama tenaga kerja) cukup tersedia didalam negeri sehingga secara teoritis, biaya produksi untuk intensitas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut yang tinggi menjadi rendah.
2. Potensi permintaan didalam negeri yang memadai.
3. Untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur didalam negeri.
4. Dengan berkembangnya industri didalam negeri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka luas.
5. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa.

Pelaksanaan strategi SI terdiri atas dua tahap yaitu :

1. Industri yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi, walaupun tidak semuanya *durable goods* (seperti kendaraan bermotor, kulkas, TV, alat pendingin). Untuk membuat barang-barang tersebut diperlukan barang modal, input perantara, dan bahan baku yang dibanyak negara yang menerapkan strategi ini tidak tersedia sehingga tetap harus diimpor.
2. Industri yang dikembangkan adalah industri hulu (*upstream industries*).

b. Strategi Promosi Ekspor (PE)

Melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi SI, badan-badan dunia (seperti IMF dan Bank Dunia) menganjurkan agar negara-negara berkembang menerapkan strategi PE. Sesuai dengan teori klasik mengenai perdagangan internasional, *outward-oriented strategy* ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam prakteknya, banyak negara yang menerapkan strategi PE dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor.

Beberapa syarat penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah sebagai berikut :

1. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik dipasar output maupun pasar input.
2. Tingkat proteksi dari impor harus rendah.
3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
4. Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor.

Menurut strategi ini, paling tidak kesempatan yang harus diberikan kepada industri-industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industri-industri untuk pasar ekspor.

2.1.4 Peranan Industri Terhadap Perekonomian

Filosofi mendasar dari pembangunan suatu negara adalah menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Di era globalisasi perdagangan dewasa ini, tidak bisa kemakmuran suatu bangsa hanya dapat terwujud melalui pembangunan industri, baik industri jasa maupun industri barang (manufaktur).

Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, pembangunan sektor manufaktur merupakan satu-satunya pilihan, sebab sektor inilah yang mampu

memberikan lapangan kerja besar dengan pengupahan yang lebih sistematis dibandingkan sektor industri produk primer (pertanian) maupun industri jasa.

Peranan industri terhadap perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa neto dari kegiatan ekspor, pembentukan nilai tambah serta sumbangan terhadap pajak bagi negara. Sayangnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 145 juta angkatan kerja (usia produktif) saat ini baru sekitar 15 juta orang yang bekerja pada sektor industri. Sektor ini ternyata juga baru mampu menyumbang sekitar 25% dari total PDB Indonesia. Angka yang relatif masih sangat kecil.

Rendahnya kontribusi industri terhadap PDB mengindikasikan bahwa pembangunan sektor tersebut sejauh ini belum mampu menjadi penolong yang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya sektor usaha lain. Kondisi tadi juga mengindikasikan bahwa pembangunan industri nasional belum mampu menciptakan keterkaitan yang efisien antar sektor hulu dan hilir serta antara industri dengan sektor ekonomi lainnya.

Tahun 2007, sebenarnya dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengikis gejala deindustrialisasi yang sempat muncul selama 2006 sekaligus menata lagi strategi dalam mengembangkan dan memperkuat struktur industri nasional. Sekarang semua bergantung pada seberapa serius dan seberapa cerdas pemerintah menciptakan kemakmuran bagi rakyat, dengan belajar pada apa yang terjadi selama tahun 2006, yang merupakan tahun kegagalan dalam pembangunan industri nasional.

Sektor industri pengolahan (*manufacturing*) merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Bantul, dengan tingkat pertumbuhan industri pengolahan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kontribusi yang diberikan sektor ini pada PDRB mencapai 19,93% pada tahun 2005 namun mengalami penurunan setelah terjadinya gempa pada Mei 2006 menjadi 17,22%, dengan sub sektor makanan, minuman, tembakau sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB sebesar 67% pertahun untuk Kabupaten Bantul. Namun setelah terjadinya gempa, sektor ini memiliki tingkat penurunan yang luar biasa dalam produksinya (UNDP, 2007).

Selain itu, subsektor yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan sektor industri pengolahan adalah subsektor tekstil, barang kulit dan alas kaki yang memberikan kontribusinya dari hasil kerajinan yang banyak diekspor ke mancanegara, selain itu sub sektor barang kayu dan hasil hutan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan yang diperoleh sektor ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang diperoleh oleh sektor yang sama di propinsi DI Yogyakarta, namun setelah terjadinya gempa memberikan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2006.

2.1.5 Permasalahan Sektor Industri

Hasil pemetaan lapangan yang dilakukan oleh tim konsultan PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal) dan tim LED Bantul menunjukkan ada beberapa kondisi di sektor industri dan perdagangan yang perlu mendapat perhatian dan solusi

untuk pengembangan ekonomi lokal ke depan (UNDP, 2007). Hal itu antara lain adalah:

1. Mengembangkan pasar tradisional dengan bangunan modern. Pengembangan Pasar Tradisional belum disertai konsep yang jelas khususnya terkait dengan *positioning* pasar tradisional Bantul dalam mata rantai produksi dan pemasaran bagi komoditas hasil olahan produk pertanian maupun kaitannya dengan *positioning* dalam perdagangan di Yogyakarta.
2. Masih adanya tumpang tindih dalam kelembagaan di tingkat birokrasi mengenai *leading sector* pengembangan pedagang dan pasar tradisional.
3. Pedagang Pasar di Bantul sebagian besar mendapat modal dari rentenir sehingga diperlukan penyediaan modal dengan bunga murah bagi mereka. Saat ini divas BKK telah mulai memberikan skema pinjaman dengan bunga ringan dengan anggaran 5 Miliar rupiah, namun jangkauannya masih terbatas.
4. Beberapa kebijakan terkait dengan menghilangkan ketergantungan pedagang pasar pada rentenir belum optimal. Hal ini dikarenakan penyelesaiannya melalui tindakan-tindakan yang bersifat birokratis. Misalnya keberadaan BUKP, keberadaan Loker lembaga keuangan di pasar, penambahan modal kerja dengan *chanelling* di Lembaga keuangan. Padahal ketergantungan pedagang diakibatkan fleksibilitas pola kredit, baik cara angsurannya,

pinjaman yang tidak memakai syarat-syarat administrasi yang berbelit, serta jam kerja yang fleksibel.

Sementara itu, program pengembangan industri yang sekarang ini sedang dan akan dijalankan oleh Kabupaten Bantul di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Pasar Seni Gabusan (PSG) sebagai sarana untuk pengrajin dan pengusaha kerajinan untuk menembus pasar dunia, dengan layanan Perdagangan Internasional melalui Pelayanan Ekspedisi Ekspor-Impor *On the spot*.
2. Memfasilitasi adanya website *Bantul Biz* sebagai media promosi bagi industri Kerajinan maupun Pariwisata di Bantul.
3. Adanya Pusat Informasi Bisnis dan teknologi (PIBT) bekerjasama dengan *Intel Indonesia Cooperation* yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bidang Teknologi Informasi bagi dan untuk menu njang pengembangan UMKM Kerajinan di Bantul.
4. Memfasilitasi Pelatihan dan Pemasaran bagi UMKM sektor industri kerajinan melalui beberapa program yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi (**disperindagkop**) Kabupaten Bantul. Pelatihan-pelatihan diantaranya ISO 2000, menyusun pengembangan pemasaran ekspor, salah satunya dengan membantu lancarnya pembayaran bagi pengrajin yang melakukan ekspor.

5. Pasca Gempa Pemerintah Bantul melakukan subsidi Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan IMB termasuk kepada pelaku usaha pasca gempa bumi.
6. Membantu dikirimnya beberapa pengrajin ke pameran-pameran baik yang berskala regional, nasional ataupun internasional sebagai sarana promosi secara rutin.
7. Pada tahun anggaran 2008 berencana memberi suntikan dana tambahan kepada BPR Bank Pasar Bantul hingga mencapai 50 M pada tahun 2010 dengan tujuan membantu pengrajin yang notabene merupakan pengusaha kecil dapat memanfaatkan dana tersebut dengan meminjam lewat BPR Bank Pasar Bantul dengan mudah tanpa agunan dan bunga rendah.
8. Membuat kebijakan tidak mengizinkan pendirian *mall* di Bantul karena 14 % penduduk bantul hidup dari sektor perdagangan di pasar tradisional.
9. Adanya dana bergulir kepada pengusaha UMKM baik secara kelompok maupun kepada individu melalui dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi Bantul maupun Disperindagkop Propinsi DIY.

Pasar Seni Gabusan yang diharapkan menjadi pusat promosi dan pemasaran produk kecil dari Bantul masih memerlukan banyak pembenahan, kurangnya atraksi hiburan untuk menarik pengunjung menyebabkan PSG kurang diminati oleh wisatawan, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan program pengembangan PSG dan menjalin kerjasama dengan pihak pariwisata untuk ikut memasarkannya.

Selain melalui PSG, program promosi dan pemasaran produk Bantul yang dilakukan melalui fasilitasi pameran berskala nasional maupun internasional harus dapat mengkombinasikan peserta dengan lebih baik, selama ini banyak pengrajin yang dikirim ternyata tidak dapat menangkap pembeli dari luar yang berskala besar, yang dapat meningkatkan peluang ekspor, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang dengan mengkombinasikan pengusaha besar dan kecil. Kebijakan larangan terhadap pendirian *mall* seharusnya juga diikuti dengan pembenahan pasar tradisional dengan lebih baik, sehingga penduduk Bantul tidak akan lari ke daerah lain ketika melakukan konsumsi, selain itu perlu juga pengawasan terhadap swalayan dan supermarket kecil yang justru dapat lebih mudah menyaingi pedagang pasar tradisional.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Defenisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat pula dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih rata. Dengan demikian maka daerah yang miskin tertinggal tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Strategi ini dikenal dengan istilah “ *Redistribution With Growth*”.

Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas harga konstan secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadi penurunan. Pertumbuhan biasanya disertai dengan proses sumber daya dan dana negara. Selain itu pertumbuhan ekonomi umumnya juga disertai dengan terjadinya pergeseran pekerjaan dari kegiatan yang relatif rendah produktifitasnya ke kegiatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi secara potensial cenderung meningkatkan produktifitas kerja, dan meningkatkan skala unit usaha.

Kuznets (1966) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Oleh karena itu beberapa komponen penting yang perlu dianalisa pada pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan masyarakat di infestasikan dengan tujuan memperbesar output. Pabrik baru, mesin peralatan, dan material meningkatkan stok modal secara fisik suatu negara dan memungkinkan tercapainya peningkatan output. Investasi produktif ini juga harus dilengkapi dengan infrastruktur sosial ekonomi yaitu: jalan, air, listrik, sanitasi, komunikasi dan sebagainya guna menunjang aktifitas perekonomian secara terpadu.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan luasnya pasar domestik.

3. Kemajuan Teknologi

Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukanya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tugas tradisional.

Kemajuan teknologi yang netral terjadi apabila penggunaan teknologi berhasil mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kemajuan teknologi hemat pekerja terjadi apabila dengan menggunakan jumlah input pekerja dan modal akan dicapai input yang lebih tinggi. Sedangkan kemajuan teknologi hemat modal akan menghasilkan metode produksi padat yang lebih efisien.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu variabel-variabel seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal dan imbalan bagi faktor dalam daerah dibatasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya diukur menurut output atau tingkat pendapatan adalah sangat berbeda-beda, dan beberapa daerah mengalami kemunduran jangka panjang.

Pertumbuhan regional adalah produk dari banyak faktor, sebagian bersifat intern dan sebagian lainnya bersifat ekstern dan sosial politik. Faktor-faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan salah satu penentu ekstern yang paling penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti telah terjadi pembangunan. Kriteria pendapatan perkapita sebagai dasar pengukuran pembangunan mulai

diragukan kebenarannya. Dalam keadaan demikian terjadi penyimpangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat. Sebaliknya pembangunan bukan saja memerlukan peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa tetapi juga harus menjamin pembagiannya secara lebih merata kepada segenap lapisan masyarakat.

2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut W.W. Rostow

W.W Rostow yang terkenal sebagai ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat menyatakan bahwa perubahan dari keterbelakangan kepada kemajuan dijelaskan dalam satu seri tahapan yang harus dilalui oleh setiap negara, seperti diungkapkan Rostow dalam bukunya "*The Stages of Economic Growth*", yang menunjukkan bagaimana seorang ahli sejarah ekonomi di dalam melakukan generalisasi perjalanan sejarah modern, adalah mungkin untuk mengenal masyarakat, dalam dimensi ekonomi yang terletak dalam salah satu dari lima kategori, yaitu masyarakat tradisional prasyarat untuk tinggal landas kearah pertumbuhan yang berkesinambungan, kematangan, dan zaman masa konsumsi yang tinggi.

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Dalam tahapan ini Rostow mengartikan tentang tahap –tahap pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahapan ini masyarakat tradisional masih menggunakan cara – cara yang primitif, seperti pada zaman sebelum Newton. Dimana cara hidup masyarakatnya masih sangat dipengaruhi dengan nilai – nilai yang dicetuskan oleh pemikiran yang tidak rasional melainkan oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun temurun.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan ciri-ciri penting dari suatu masyarakat yaitu perubahan dalam sistem politiknya, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti ini muncul maka dapat dikatakan proses pertumbuhan ekonomi sudah mulai berlaku. Sehingga Rostow menyebut tahapan ini adalah sebagai masa transisi, dimana masyarakat sudah harus mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan dan terus berkembang.

3. Tahap Lepas Landas

Dalam tahapan ini pertumbuhan terus terjadi, kemudian adanya perubahan yang cukup drastis di masyarakat, politik, dan juga ekonomi. Adapun ciri – ciri tahapan lepas landas yaitu :

1. Terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif, kenaikan itu terjadi mulai dari 5% menjadi 10%.
2. Terjadinya perkembangan pada sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi.
3. Adanya suatu platform politik, sosial, intitusional yang akan menjamin berlangsungnya perluasan struktur modern dan juga potensi ekonomi.

4. Tahap Menuju Kedewasaan

Pada masa ini Rostow mengartikan bahwa masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini peran sektor indusri sangat penting, sedangkan sektor pertanian sudah mulai menurun. Kemahiran para pekerja juga semakin meningkat.

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Tahapan ini adalah tahapan yang terakhir dari teori pertumbuhan Rostow, dimana masyarakat lebih memeperhatikan masalah konsumsi dan kesejahteraan , dan bukan lagi terhadap masalah produksi. Dalam hal ini bagaimana pemerintah berusaha untuk memperbesar kekuasaan ke luar negeri, sehingga dapat menahluukkan Negara-negara lain. Kemudian masyarakat mempertinggi konsumsi barang-barang mewah.

Negara-negara maju seluruhnya telah melalui tahapan yakni tahapan tinggal landas kearah pertumbuhan yang berkesinambungan. Sedangkan negara-negara

terbelakang masih berada dalam tahapan penyusunan kerangka landasan. Tinggal mengikuti suatu set aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas. Yang pada gilirannya akan menuju kearah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Salah satu fikiran utama mengenai pembangunan ialah bahwa setiap upaya untuk tinggal landas harus ada mobilisasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.2.3.2 Perubahan Struktur Ekonomi dan Industri

Banyak negara berkembang yang juga mengalami transisi ekonomi industrialisasi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda satu dengan yang lain. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal-hal berikut:

1. Kondisi dan Struktur Awal Ekonomi dalam Negeri

Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri besar seperti mesin, besi, dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman.

2. Besarnya Pasar dalam Negeri

Dalam hal ini, besarnya pasar dalam negeri ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan rill perkapita akan mempengaruhi pola dan proses transisi ekonomi. Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia

dengan jumlah penduduk lebih dari 200juta orang (walaupun tingkat pendapatan per kapita rendah), merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan ekonomi termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung.

3. Ciri Industrialisasi

Yang dimaksud dengan ciri industrialisasi disini adalah cara pelaksanaan strategi yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri dan insentif yang diberikan.

4. Keberadaan Sumber Daya Alam (SDA)

Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur), dari pada negara yang miskin SDA.

5. Kebijakan atau Strategi Pemerintah yang Diterapkan

Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif seperti Indonesia selama orde baru berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung perkembangan industrinya.

Keadaan Industri Kerajinan Bantul pasca gempa sangat memprihatinkan, porakporandanya tempat kerja bahkan juga banyak yang sekaligus tempat tinggal, hancurnya peralatan/ mesin-mesin kerja, bahan baku, barang setengah

jadi, barang jadi siap kirim., alat-alat dan bahan pendukung. Selain itu mundurnya mentalitas pekerja, mental entrepreneur, beban hutang / kredit yang menghimpit, beban pekerjaan / tanggungan pekerjaan yang belum terselesaikan, hilangnya pelanggan, serta turunnya pendapatan dan omset ditambah lagi dengan kondisi ekonomi secara nasional yang ikut memburuk menyebabkan sektor kerajinan mengalami penurunan yang signifikan.

Paska terjadinya gempa bumi di Kabupaten Bantul, sebagian besar proses produksi masih tetap dapat berjalan walaupun tidak dalam kapasitas penuh, namun hambatan terbesar yang dihadapi selain masalah hilangnya bahan baku dan juga rusaknya alat kerja adalah masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang terampil, mahalnya tenaga kerja dan masih banyaknya tenaga kerja yang berubah profesi menjadi tenaga kerja bangunan yang memang banyak dibutuhkan untuk merekonstruksi perumahan setelah terjadinya gempa bumi.

Berbagai masalah yang muncul pada sektor industri pengolahan di Bantul pada dasarnya masih pada permasalahan yang sama, akan tetapi permasalahan makin muncul dan berkembang dengan adanya gempa bumi yang terjadi. Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah: Ketidakmampuan membayar kredit, omzet yang menurun, ketidakmampuan berproduksi, kehilangan pasar, mundurnya mentalitas pekerja dan mental entrepreneur, beban pekerjaan yang belum terselesaikan dan ketidaksinkronan program pengembangan industri yang dibuat eksekutif dengan kebutuhan riil.

Berbagai kebutuhan pendukung yang masih diperlukan oleh kabupaten Bantul untuk pengembangan sektor industrinya antara lain adalah: perlunya database industri sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri bisa optimal, selain itu juga diperlukan lembaga desain produk mebel dan kerajinan sehingga produk kerajinan mempunyai karakter yang kuat, serta perlu ditingkatkannya kemampuan pengrajin membaca *trend* pasar sehingga produknya dapat diserap pasar.

2.3 PDRB

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi/ pembangunan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang nominal dan jasa, serta ekspor netto.

2.3.1 Metode Perhitungan PDRB

2.3.1.1 Metode Langsung

1. Pendekatan produksi

Pendekatan dengan cara ini dimaksudkan untuk menghitung netto barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi selama setahun di semua wilayah. Barang dan jasa yang diproduksi ini dinilai pada harga produsen yaitu harga yang belum termasuk biaya transport dan pemasaran karena biaya transport

akan dihitung sebagai pendapatan sektor transport, sedangkan biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sektor perdagangan.

2. Pendekatan pendapatan

PDRB dirumuskan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi (berupa gaji dan upah, bunga, sewa dan laba) yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah / region dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian diatas, maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan pengeluaran

PDRB dihitung jumlah seluruh komponen pengeluaran akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto serta ekspor netto (yaitu ekspor dikurangi impor) didalam suatu wilayah / region dalam jangka tertentu /setahun. Dengan metode ini, perhitungan nilai tambah bruto bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa yang di produksi.

2.3.1.2 Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat

region. Sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitanya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

1. PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan

Pendapatan regional suatu provinsi dapat dipakai untuk mengukur kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar dapat menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disertai kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan semacam ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil.

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan di atas, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

2.4 EKSPOR

2.4.1 Pengertian Ekspor

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Menurut pasal 1 ayat 9 (Bab 1) UU No 32/1964, ekspor adalah pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran. Keluar Indonesia berarti keluar dari daerah. Pabean Indonesia atau keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia, keluar dari daerah berarti keluar peredaran diluar daerah pabean Indonesia dan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Jadi, hasil yang diperoleh dari kegiatan mengekspor adalah berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau yang biasa dikenal dengan istilah devisa yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Menurut Michael P.Todaro, yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan perdagangan yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang efisien (Todaro, 2000).

Menurut pendapat Meir dan Baldwin, ekspor adalah salah satu perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara dimana dapat mengadakan perluasan pasar antara beberapa negara dimana dapat mengadakan perluasan pasar dalam sektor industri, sehingga mendorong dalam sektor industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dan perekonomian (Sadono, 2006).

2.4.2 Peran Sektor Ekspor

Dari definisi-definisi ekspor di atas dapat di simpulkan bahwa peranan sektor ekspor antara lain yaitu:

- a. Memperluas pasar diseberang lautan bagi barang-barang tertentu. Seperti yang ditekankan oleh para ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika industri itu dapat menjual hasilnya diseberang lautan dari pada hanya dalam negeri yang sempit.
- b. Ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru. Akibatnya barang-barang dipasar dalam negeri mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas.
- c. Perluasan kegiatan ekspor mempermudah pembangunan, karena industri tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkannya seandainya barang-barangitu akan dijual didalam negeri akibat tingkat pendapatan rill yang rendah atau hubungan transportasi yang memadai.

Dengan demikian selain menambah peningkatan produksi barang untuk dikirim keluar negeri, ekspor juga menambah permintaan dalam negeri, sehingga secara tidak langsung permintaan luar negeri mempengaruhi industri dalam negeri untuk menggunakan faktor produksinya, misalnya modal, dan juga menggunakan metode produksi yang lebih murah dan efisien sehingga harga dan mutu dapat bersaing dipasar internasional.

2.4.3 Struktur Ekspor Industri Manufaktur

Melihat angka-angka perkembangan investasi dan nilai tambahnya yang cenderung meningkat, sektor industri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun kapasitas untuk menghasilkan nilai tambah dan produktivitas masih perlu ditingkatkan. Demikian pula investasi, khususnya yang padat karya masih perlu didorong untuk penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Untuk itu, promosi dan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif masih harus terus ditingkatkan.

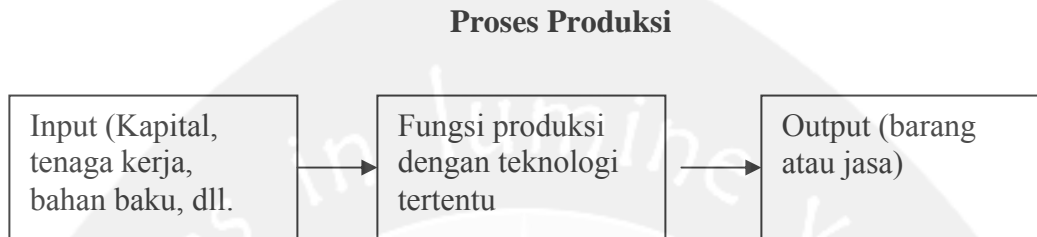
Berdasarkan nilai ekspornya, produk kerajinan mendominasi ekspor kabupaten Bantul setiap tahunnya dan mebel kayu menjadi komoditas yang memiliki nilai produksi dan penjualan ekspor tertinggi, terutama sejak tahun 2004 yang mengalami peningkatan lebih dari 50%. Sampai dengan tahun 2005 nilai ekspor mebel kayu mencapai 8,1 Juta US Dollar, namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana nilai ekspornya menurun menjadi 6,6 juta US Dollar. Disisi lain, produk tekstil yang sempat juga memiliki nilai ekspor yang tinggi pada tahun 2004, yakni sekitar USD 5,2 juta pada tahun berikutnya nilai ekspornya anjlok menjadi hanya USD 1,5 juta (UNDP, 2007).

2.5 TOTAL OUTPUT/TOTAL PRODUKSI

2.5.1 Pengertian produksi

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output, biasanya dalam ekonomi dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input

menjadi output dinamakan produksi (Samuelson dan Nordhaus, 2002). Produksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara matematik fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, X, \dots, AZ)$$

Dimana:

Q = Output

K, L, X = Input (kapital, tenaga kerja, bahan baku)

AZ = Pengalaman (*learnig by doing*)

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab menghasilkan barang atau jasa harus menentukan kombinasi input-input yang akan dipakai untuk menghasilkannya.

Nilai produktivitas marjinal (*marginal value product*) suatu faktor adalah nilai output tambahan yang dapat diproduksi dengan menyewa satu unit faktor yang bersangkutan. Nilai ini diukur dengan hasil penggalan harga output dengan produktivitas marjinal input tersebut.

2.6 Penyerapan Tenaga Kerja

Di Indonesia pengertian tenaga kerja yang sering digunakan adalah tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan

yang melakukan pekerjaan lain, seperti sekolah, dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik dan sewaktu-waktu dapat kerja.

Dalam Undang-undang pokok ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses dari usaha-usaha penyerapan tenaga kerja yang merupakan topik dari penelitian ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan industri dapat berjalan sebagai mana mestinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong perekonomian rakyat.

Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan secara luas, menyerap atau menghisap dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja disuatu lapangan usaha, untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri.

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur yang berbeda-beda. India menggunakan batas umur 14 tahun sampai dengan 60 tahun, Amerika Serikat menggunakan batasan umur 10 tahun keatas tanpa batasan umur maksimum.

Penggunaan tenaga kerja yang tidak mengenai batas umur tersebut pada kenyataanya anak-anak dibawah umur 10 tahun juga banyak yang dipekerjakan. Beranjak dari kenyataan ini, maka konsep yang digunakan dalam survey industri yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tenaga kerja/pekerja dalam perusahaan industri

adalah semua orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lain, baik berupa uang ataupun barang, serta pekerja tidak dibayar, seperti pemilik dan pekerja keluarga.

Tenaga kerja yang ada atau lapangan usaha yang ada, tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan kondisi tidak siap pakai. Masalah penyerapan tenaga kerja ini juga tidak terlepas dari kesempatan kerja yang tersedia ditengah-tengah masyarakat. Ketidak seimbangan penawaran tenaga kerja dengan pasar kerja akan menimbulkan pengangguran.

2.6.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi permintaan Tenaga Kerja

a. Tingkat Upah

Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (*scale effect*).

Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga

kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*).

b. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi yang menyebabkan hasil produksi yang lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama, yang lebih berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang lebih besar dari pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin *huller* (penggilingan padi) akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja untuk menumbuk padi.

c. Produktifitas Tenaga Kerja

Beberapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh beberapa tingkat produktifitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 30 karyawan dengan produktifitas standar yang bekerja selama 6 bulan. Namun dengan karyawan yang produktifitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 20 karyawan dengan waktu 6 bulan.

Arsyad (2004) mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 6 hal, yaitu perkembangan barang modal per pekerja, meningkatkan skala usaha, perpindahan pekerja antar jenis kegiatan, perubahan komposisi output dari tiap sektor atau subsektor, secara perubahan tehnik produksi.

2.7 Definisi Usaha

Sebelum membahas definisi usaha kecil dan menengah, yang dimaksud dengan perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Profil Usaha Industri UKM, BPS, 2001).

Sementara itu, dalam kamus lengkap ekonomi Collins disebutkan bahwa industri adalah suatu kelompok aktivitas ekonomi yang berkaitan dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis dari barang dan jasa yang disediakan. Jadi UKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal.

Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Bagaimana dengan anjloknya pendapatan masyarakat yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar. Bukan tidak mungkin produk-produk UKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk

usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat.

Secara umum, hasil survei BPS menunjukkan beberapa kecenderungan menarik, yaitu jumlah unit usaha UKM cenderung berkurang. Jumlah unit usaha pada tahun 2000 masih tetap lebih sedikit dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah tenaga kerja. Hanya saja, penurunan jumlah tenaga kerja tidaklah setajam penurunan jumlah unit usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap oleh masing-masing unit usaha secara rata-rata justru mengalami kenaikan. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa UKM sebetulnya juga mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja di masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi kemampuan masing-masing UKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.

2.8 Modal

Berdasarkan UU NO.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, peraturan pemerintah No.44 tahun 1997 tentang kemitraan dan keputusan bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No.22/sSK/1998 dan 07/SKBM/1998 tentang pemberdayaan Usaha Kecil melalui kemitraan dalam rangka penanaman modal, dikelompokkan jenis usaha berikut ini:

a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu miliar);
- 3) Milik warga Negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau Usaha Besar.
- 5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

b. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil. Usaha Menengah dan Besar meliputi usaha nasional (milik Negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

c. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bidang atau jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah jenis usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Penetapan jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional. Pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan dalam rangka penanaman modal, bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan dibidang penanaman modal adalah untuk:

- 1) Meningkatkan peran serta usaha kecil dibidang penanaman modal dalam rangka pemerataan usaha dan kepemilikan aset produktif.
- 2) Mewujudkan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil secara kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan usaha secara vertikal dan secara horizontal dengan melaksanakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar.

2.9 Studi-Studi Terkait

Studi terkait pernah dilakukan oleh Wirda Hanum dari Universitas Sumatra Utara yang mengambil judul "Analisis Perkembangan Industri terhadap Pertumbuhan Sektor Industri di Sumatra Utara (2008)." Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam hal lokasi dan rentang waktu penelitian.

Penelitian terkait kedua dilakukan oleh Nunuy Nur Afiah dari Universitas Padjadjaran dengan judul “Peran Kewirausahaan dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global” (2009). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur pada buku teks, artikel media massa, dan penjelajahan on-line. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor UKM memiliki kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia. Terdapat faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap perkembangan UKM, serta faktor kewirausahaan berperan penting dalam peningkatan kapabilitas UKM di Indonesia.

Studi terkait yang ketiga berjudul “Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah” yang dilakukan oleh Carunia Mulya Firdausy (2005) dari Bidang Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menyimpulkan bahwa prospek bisnis UKM di Indonesia masih menghadapi ujian berat, walaupun dari sisi potensi jumlah dan kemampuan menyerap tenaga kerja, UKM memiliki keunggulan mutlak. Ujian berat yang dihadapi UKM masih berkuat dalam hal peningkatan kemampuan internalnya sendiri, maupun juga permasalahan eksternal lainnya. Kondisi UKM yang belum baik ini, jika tidak diperbaiki segera akan menjadi bertambah terpuruk dengan adanya perdagangan bebas dan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemelut yang dihadapi UKM, maka tidak lain kebijakan yang mendorong langsung perkembangan UKM pada masa kini dan di masa datang sangat diperlukan.